

Forum Freedom 6, 27 Juni 2005

Tema: Privatisasi

Nara sumber : M. Chatib Basri

Petikannya:

Bagaimana kaum liberal Indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada di tengah kita? Freedom Institute bekerja sama dengan radio 68H sajikan Forum Freedom..

Halo selamat pagi, pendengar.. Kita bertemu lagi dalam acara Forum Freedom kerja sama Freedom Institute dengan Radio 68H bersama saya Hamid Basyaib. Pagi ini kita menghadirkan dan bertemu lagi dengan M. Chatib Basri. Saya biasa memanggilnya Dede. Dede Chatib Basri ini sekarang Direktur Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM UI). Dia juga dosen di pasca sarjana UI dan banyak lagi kegiatan lainnya.

Hamid Basyaib (HB): Selamat pagi De..

M. Chatib Basri (MCB): Selamat pagi Bung Hamid.

Hb: Kemarin Anda sudah ngomong dan menerangkan soal ekonomi liberal. Sekarang saya kira kita bisa masuk ke isu-isu yang terkait atau sejalan dengan prinsip liberal, dan salah satu yang paling mencolok adalah privatisasi. Ini kontroversial dan penting karena menyangkut hajat hidup berjuta-juta orang dan menyangkut aset yang begitu besar. Lalu, ini pertanyaan elementer sekali: apa sih sebetulnya privatisasi itu?

MCB: Sebetulnya per defenisi adalah menyerahkan kepemilikan kepada swasta. Jadi dari satu usaha yang dimiliki oleh pemerintah (BUMN) itu kepemilikannya diberikan kepada swasta. Mekanismenya ada yang melalui pasar modal, strategic search dan lain-lain. Tapi intinya adalah bahwa kepemilikan pemerintah itu kemudian dimungkinkan pihak swasta untuk memiliki. Bisa juga publik. Tapi saya enggak bilang bahwa swasta itu konotasinya perusahaan besar. Anda dan saya itu privat. Beli saham walaupun tidak banyak.

HB: Yang saya tahu, Anda termasuk ekonom yang sangat setuju dengan privatisasi. Bisa anda kemukakan alasannya?

MCB : Saya ambil contoh begini: orang selalu salah tangkap mengenai privatisasi. Ide privatisasi seolah-olah untuk menambal anggaran. Jadi karena anggaran kita itu kurang uangnya, kemudian kita jual aset supaya uang kita cukup. Sebetulnya idenya enggak gitu. Apakah kita punya persoalan dengan anggaran atau enggak, privatisasi harus dilakukan. Karena dasar dari privatisasi adalah efisiensi. Saya ambil contoh yang gampang, saya enggak punya tendensi apa-apa, tapi saya mau tunjukkan begini: dulu kita punya satu-satunya stasiun tv namanya TVRI. Kemudian pasarnya dibuka, dimungkinkan macam-macam stasiun tv masuk. Pertanyaan saya begini: apakah orang masih lebih banyak nonton tv yang dimiliki negara atau yang swasta?

HB: Kelihatannya swasta.

MCB: Pertanyaannya selanjutnya: kenapa swasta?

HB: Karena pilihan acaranya menarik.

MCB: Kenapa dia harus bikin acara menarik? Karena kalau dia enggak bikin acara yang menarik, dia enggak dapat uang. Kalau dia enggak dapat uang, maka perusahaannya tutup. Sedangkan apa yang terjadi dengan tv yang dimiliki negara, kalau tokoh dia bangkrut, negara akan tutupi melalui anggaran.

HB: Negara yang pasang badan?

MCB: Ya, jadi enggak pernah ada yang namanya constraint, kendala di dalam budget.

HB: Jadi enggak ada semangat kompetisi?

MCB: Ya, dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya Anda ketemu dengan temen-temen yang dari privat sector, dia kalau enggak dapat berita akan celaka. Karena pemrednya akan bilang, "Enggak bisa ini, kalau kayak gini, ya mending keluar aja". Tapi itu enggak akan terjadi di dalam suatu perusahaan yang dikelola oleh negara. Karena setiap kali ada kerugian, negara akan tanggung melalui budget. Jadi ini yang kemudian tidak memaksa perusahaan untuk menjadi lebih efisien. Disitu sebetulnya inti dari kenapa privatisasi menjadi penting. Dan saya bisa tunjukkan buktinya: Indosat misalnya. Indosat itu setelah diprivatisasi performancenya jauh lebih baik. Begitu juga dengan BCA. Yang paling gampang Anda lihat saja harga sahamnya. Harga sahamnya naik dibandingin ketika masih ditangani oleh BPPN. Indosat, Anda bisa lihat bagaimana performance yang terjadi. Kalau efisiensi terjadi, maka harganya

jauh lebih murah.

Saya ambil contoh lagi misalnya penerbangan. Dulu penerbangan itu hanya boleh Merpati dan Garuda. Coba, sekarang siapa yang bisa membayangkan bahwa orang-orang dari desa bisa naik pesawat. Sekarang orang mulai complaint, "wah, sekarang udah enggak enak ke airport, karena udah enggak beda banyak dengan terminal bus". Itu sebetulnya kenikmatan publik yang bisa dinikmati karena privatisasi. Kita sering lupa itu. Kita selalu menganggap bahwa kalau privatisasi itu bisnis besar. Enggak, yang paling diuntungkan sebetulnya konsumen.

HB: Nah, dalam kenyatannya katakan benar yang anda katakan itu, tapi orang mengkritik bahwa yang punya akses untuk mendapat saham besar atau mayoritas adalah raksasa-raksasa juga. Misalnya Indosat: Singtel. Telkom juga. Dia cenderung memperbesar sahamnya. Bagaimana anda melawan atau membantah kritik seperti itu?

MCB: Saya ambil contoh begini: privatisasi itu enggak harus selalu dibayangkan dengan kasus Indosat. Itu karena kebetulan di dalam kasus Indosat, privatisasi dilakukan untuk mencari partner yang bisa meningkatkan kapasitas teknologi, sehingga akhirnya yang muncul yang besar.

Saya ambil contoh di Australia. Ketika Telstra diprivatisasi, pertama kali sahamnya ditawarkan itu kepada pelanggan Telkom. Ditanya, "Anda sebagai pelanggan Telkom, Anda punya hak utama kalau Anda membeli saham". Itu bagian dari privatisasi juga. Bahkan John Rawls menyebutnya sebagai demokrasi dari kapitalisme. Kalau Anda pernah ingat satu novelnya Emil Zola yang judulnya *Germinal*, itu ada pekerja tambang batubara di Monsow yang pada akhirnya bilang, "ok kita hidup dengan perjuangan buruh, tapi toh kita harus hidup dengan kenyataan". Ya, bahwa mereka harus makan.

Dan itu persis yang terjadi di Inggris pada jaman Thatcher. Ketika semua orang bicara mengenai bahayanya Partai Konservatif, Margaret Thatcher terpilih dua kali berturut-turut dan itu didukung oleh buruh. Padahal statemennya sombong sekali, "saya ingin membuat sebuah Inggris yang bersih dari sosialisme" ini statmen yang berlebihan. Tapi ternyata dia dua kali didukung oleh Partai Buruh. Kembali lagi kepada pertanyaan Anda tadi: apakah harus yang besar? Enggak selalu harus begitu. Tergantung dari polanya. Tapi kalau obyektifnya meningkatkan teknologi, maka kita harus gandeng yang besar. Dan orang selalu bilang, "toh nanti yang menang asing". Ya, buat saya sederhana aja, kalau Anda enggak mau menang asing, Anda beli mahal dong dari asing. Kalau asing itu berani membeli aset kita dengan harga yang mahal, kenapa kita enggak mau beli aset kita sendiri dengan harga mahal. Kalau kita enggak mau, itu artinya kita enggak cukup cinta dengan produk kita. Cuman kita seneng ributnya aja.

HB: Kemudian bidang-bidang apa yang pantas atau tidak pantas diprivatisasi?

Banyak kritik yang mengatakan bahwa barang-barang publik atau barang-barang yang menyangkut kehidupan orang banyak kok diserahkan pada pihak asing? Bagaimana Anda menjawab pertanyaan itu?

MCB: Corak pertanyaan itu saya balik: gimana Anda mendefinisikan bahwa barang itu adalah kebutuhan penting buat publik? Saya tanya misalnya gini: kalau kita bicara mengenai listrik itu (yang ngurus) harus negara, karena itu kebutuhan publik, sampah itu strategik enggak? Itu barang yang sangat sensitif lho. Apakah itu harus ditangani negara? Kan sebetulnya tugas negara itu udah banyak sekali. Mungkin Anda sempat nonton film atau baca bukunya Tittle of the Idea: ketika Margareth Thatcher pergi ke Polandia: waktu itu Polandia masih di bawah sosialisme: dan diceritakan bahwa begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan negara, komentar Thatcher pada waktu itu sederhana sekali, "Uh, Anda kalau hanya mengontrol mengenai politik, keamanan. Kenapa kita mesti campur lagi, negara tugasnya bukan dagang kok. Memang dia enggak bisa untuk itu. Dia hanya regulator, dia hanya berfungsi sebagai fasilitator. Itu aja yang bisa dilakukan". Jadi kalau tadi Anda bilang kalau ada barang-barang yang menyangkut kebutuhan pokok, kebutuhan publik, maka pertanyaannya: gimana Anda mendefinisikan itu?

HB: Nah, gimana kalau itu didefinisikan oleh undang-undang dasar? Sebutlah misalnya pasal 33?

MCB: Ok, kalau itu memang didefinisikan sebagai satu keputusan kita bersama, kita juga harus lihat konteksnya. Konteksnya dalam arti bahwa kita sepakat bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Tapi ini mejadi perdebatan semantik. Pengertian dikuasai seperti apa, apakah dalam manajemennya atau dalam kepemilikan. Kalau saya melihatnya bahwa isi yang paling penting bukan pada perdebatan mengenai aspek legalitasnya aja, tapi apakah itu digunakan sepenuhnya untuk manfaat masyarakat. Saya sekarang tanya: masyarakat lebih baik dengan jasa publik yang baik atau yang buruk? Itu pertanyaannya. Kalau orang bisa terbang dengan fasilitas pesawat yang lebih baik dan harga lebih murah, kenapa dia harus bayar yang lebih mahal? Tapi persoalannya dengan birokrasi kan begini: uang itu enggak jadi (bukan) masalah, tapi masalah jadi uang. Kalau Anda bisa bikin sesuatu jadi masalah, Anda punya kekuatan untuk membuat uang.

HB: Ada banyak aspek lainnya ya, misalnya privatisasi bagi para penganjurnya dianggap mempersempit ruang untuk korupsi. Apakah ini betul?

MCB: Saya kira begini. Kita berbicara mengenai resistensi terhadap privatisasi. Dibanyak negara, bukan hanya Indonesia, semua melawan terhadap kecenderungan privatisasi, terutama partai politik. Kenapa? Anda bisa bayangkan kalau mau pemilihan umum, entah itu di Inggris, Indonesia atau di mana-mana, DPR minta kepada Citibank, atau kepada Unilever untuk membiayai partainya. Itu Unilever atau Citibank akan tanya kepada headquarternya di London, "Bisa enggak kita membiayai salah satu partai politik di

Indonesia?". Dan jawabannya pasti enggak. Tapi Anda bisa dengan mudah membayangkan kalau itu terjadi pada BUMN, dimana pimpinannya di pengaruhi oleh anggota-anggota DPR, maka BUMN bisa dijadikan cash cow (kambing congek) untuk sumber uang. Dan ini terjadi dalam kasus macam-macam. Untuk menghindari itu, maka privatisasi sebetulnya adalah jalan yang amat baik. Tentunya orang akan mengatakan bahwa korupsi kan tidak hanya terjadi di pemerintahan, tapi juga swasta. Bedanya adalah kalau kasus korupsi terjadi di swasta, maka uang pemerintah jangan diikutsertakan. Lihat kasus Enron. Enggak ada satu pun uang publik yang ikut di sana. Jadi kalau perusahaannya mau tutup, ya tutup aja. Gara-gara dia enggak ditalangi oleh pemerintah. Di sini masalahnya enggak terbiasa (rugi). Kalau bisnis boleh untung, tapi kalau rugi enggak boleh. Jadi setiap kali mau rugi, pemerintah harus turun tangan. Nah, ini juga masyarakat kita lucunya begitu benci dengan pemerintah, tapi setiap kali ada persoalan mereka begitu cinta (mengharapkan bantuan pemerintah).

HB: Tadi kita ngomong soal privatisasi, khususnya pernyataan bahwa privatisasi itu mempersempit ruang korupsi, dan Dede menganggap benar kalau contohnya politisi atau pejabat pemerintah yang meminta dana dari BUMN. Tapi kalau BUMN-nya diubah jadi perusahaan swasta, maka dia tidak mungkin lagi ngambil uang dari situ. Dan saya kira ini sudah pasti benar. Cuma ada juga anggapan bahwa privatisasi ini dianggap memperlebar urang si kaya dan miskin. Saya kira Anda sudah menyinggung sedikit, tapi samar-samar. Bagaimana Anda memperjelas soal ini?

MCB: Saya enggak sepakat. Contoh yang paling gampang adalah industri penerbangan. Dengan privatisasi sebetulnya orang bisa membeli tiket murah. Sekarang harga tiket pesawat itu enggak beda jauh dengan tiket bus. Kita enggak bisa membayangkan sebetulnya saudara-saudara kita dari desa sekarang bisa dengan mudah pergi naik pesawat. Artinya, dengan privatisasi yang dilakukan, dengan pasar yang dibuka, orang punya akses untuk menikmati penerbangan, yang dulu itu impiannya hanya gatot kaca yang bisa terbang. Sekarang itu betul-betul dia bisa naik pesawat terbang dengan harga yang relatif bisa dijangkau. Itu yang terjadi.

Saya ambil contoh lain, misalnya air. Karena air ini dikuasai oleh perusahaan negara, aksesnya terbatas, maka orang-orang yang paling miskin, misalnya di Penjaringan, dia tidak punya akses air. Dia harus beli air. Yang punya akses air di Cibubur. Dia beli air empat kali, lima kali lebih mahal. Seandainya diprivatisasi, akses air dilakukan secara terbuka, maka orang-orang itu bisa punya akses air dan membayar air jauh lebih murah. Negara kita itu, saya kira bukan hanya di sini, selalu mengintervensi dalam semua hal, dan ini selalu membelenggu cara berfikir kita. Saya ambil satu contoh, ini yang enggak berhubungan 100% dengan privatisasi, tapi bagaimana rule negara itu begitu dominan. Anda mungkin ingat tahun 9 ketika ada namanya Miss Indonesia. Waktu itu yang terpilih Alya Rohali. Dan itu dilarang. Anda bisa lihat bahwa negara sampai urusan kecantikan pun masuk.

HB: Dan sekarang pun masih ribut soal Artika, miss Indonesia yang ikut Miss

Universe di Bangkok itu?

MCB: Persis. Saya bisa kebayang kalau dalam sidang kabinet itu diumumkan: inflasi terkendali dan kecantikan stabil karena ada di tangan negara. Ini (negara) kan sebenarnya enggak ada urusan. Hal-hal seperti ini sebenarnya cara kita melihat bahwa semua persoalan harus ditangani negara.

HB: Tapi jelas bahwa menurut Anda privatisasi itu kira-kira mendemokratisasikan hak. Dulu orang enggak punya uang atau cukup uang untuk naik pesawat, sekarang punya. Tapi di sisi lain kan mungkin privatisasi melonjakkan harga, karena kalau dia ditangan pemerintah maka pemerintah mensubsidi atau dengan berbagai cara agar harga dibikin murah. Begitu swasta masuk, enggak bisa nih harga lima rupiah lagi, sekarang kita naikan jadi sepuluh rupiah. Artinya, privatisasi juga bisa menaikkan harga. Misalnya jalan tol. Jalan tol katanya, menurut kritik orang, di mana-mana di seluruh dunia cenderung menurun harganya. Di Indonesia terbalik. Sedikit-sedikit, setiap tahun atau dua tahun sekali harganya naik. Itu karena yang memiliki jalan tol itu swasta, bukan negara sepenuhnya. Gimana ini?

MCB : Sebetulnya begini: ada proses dimana itu akan selalu terjadi. Saya ambil contoh yang paling gampang adalah listrik. Kalau privatisasi listrik dibiarkan bebas, itu harga listrik akan naik. Karena yang sekarang ini sebetulnya perusahaan enggak bisa jalan. Listrik itu enggak bisa jalan dengan kondisi harga yang sekarang.

HB : Artinya selama ini sangat disubsidi?

MCB : Sangat disubsidi. Jadi kalau dilepas, itu mesti harganya naik. Tapi akibatnya apa? Akibatnya PLN enggak bisa melakukan ekspansi. Beberapa minggu lalu kita punya persoalan dimana listrik harus dipadamkan, bisnisnya menjadi sulit. Dan yang paling menanggung beban sebetulnya adalah kelompok miskin. Karena akses listrik itu menjadi terbatas. Akibatnya, orang miskin itu membayar biaya energinya lima kali lebih mahal. Kalau kita di kota punya akses kayak gini, itu enggak akan terus. Tapi mereka yang tidak punya akses terhadap listrik harus menanggung bebannya. Jadi ketidakterediaan barang publik, akibat negara harus mensubsidi terus menerus, pada akhirnya burdennya ditanggung oleh kelompok miskin.

HB: Bagaimana mekanismenya sampai pada kesimpulan bahwa kelompok miskinlah yang paling berat menanggung beban listrik ini?

MCB: Karena gini. Kalau Anda enggak bisa punya energi listrik di rumah, Anda mesti cari sumber energi lain.

HB: Genset misalnya?

MCB: Genset pasti enggak bisa dibeli orang miskin. Anda cari kayu, minyak tanah, dan macam-macam yang biayanya bisa jadi jauh lebih mahal. Kalau perusahaan misalnya, Anda enggak bisa dapat akses listrik karena sangat terbatas, maka hanya perusahaan besar yang bisa survive. Karena dia punya genset. Tapi perusahaan kecil enggak pernah bisa. Jadi kalau lihat sebetulnya dengan akses listrik yang terbatas, itu adalah kelompok miskin yang amat terganggu. Tapi untuk membuat kelompok miskin ini bisa punya akses, harga tarif listriknya harus dinaikkan. Ini tahap awal dari sebuah proses privatisasi.

HB: Jadi tahap awal itu kira-kira harga mesti melonjak. Artinya dia menormalkan harga dulu, karena dia selama ini sangat disubsidi?

MCB : Persis. Serahkan kepada pasar dan setelah itu akan ada kompetisi, dan harganya akan mengalami penurunan. Saya ambil contoh yang paling gampang adalah negara yang relatif maju : Australia, Singapura. Itu kalau anda telpon, itu biayanya udah hampir gratis. Kecil sekali. Kemudian di Australia itu listriknya relatif udah bisa pilih, kalau Anda enggak mau dengan yang ini bisa dengan yang lain. Telpon juga begitu. Malah kalau Anda di Australia, itu sistem bayarnya enggak per pulsa, tapi sekali angkat. Kalau Anda menelpon, itu Anda bayar 15 sen. Anda mau ngomong tiga jam, sepuluh jam, itu terserah Anda.

HB : Anda yakin kalau privatisasi diberlakukan, katakanlah listrik, listrik akan mengalami equilibrium baru setelah subsidi (di)lepas dan harga naik. Ada enggak kemungkinan, secara teoritis, bahwa sejumlah perusahaan listrik itu, yang tadinya satu jadi lima, membuat semacam kartel (kesepakatan). Saya melihat kecenderungan ini terjadi pada bisnis properti. Bisnis properti itu, terus terang saya curiga ada kartelisasi, semacam asosiasi yang menetapkan harga, sehingga kalau Anda lihat sekarang, harga rumah-rumah itu dimanapun relatif sama. Daerah ini dengan daerah itu enggak terlalu jauh. Jadi saya curiga jangan-jangan mereka rundingan dan menetapkan batas bawah harga. Apakah Anda tidak khawatir bahwa sejumlah perusahaan listrik itu juga melakukan praktek seperti ini?

MCB: Hal ini bisa aja terjadi. Tapi prosesnya memang agak rumit karena di dalam bisnis itu kan semua orang cenderung cari untung. OPEC aja bikin kartel enggak berjalan segampang itu, karena setiap negara suka colong kesempatan untuk memproduksi lebih. Tapi sendainya itu terjadi, dan saya enggak menutup mata bahwa kartel itu terjadi, di mana harganya kemudian ditentukan. Tapi Anda jangan lupa bahwa prinsip kartel adalah sesuatu yang paling dibenci di dalam proses ekonomi liberal. Karena itu bukan mekanisme

pasar. Makanya kemudian di negara seperti Amerika, dan di sini juga dibikin, itu ada yang namanya Sherman Act, undang-undang anti monopoli. Dan itu adalah bagian kelengkapan dari pasar. Karena kalau kemudian sudah terjadi monopoli, ide dari pasar itu enggak jalan lagi.

HB: Ini menarik sekali. Masalahnya terjadi pada bisnis penerbangan. Misalnya Garuda. Karena perusahaan penerbangan ini terpojok dengan banyaknya swasta yang besar, maka dia terus melobi pemerintah dan DPR untuk menetapkan batas bawah harga. Artinya, dia menduga bahwa perusahaan-perusahaan baru itu unggul karena tiketnya murah. Kalau begitu tiket murah itu enggak boleh dijual murah. Harga murahnya harus ditetapkan. Nah ini kan yang terjadi dibisnis penerbangan. Apakah dalam sistem liberal boleh dilakukan?

MCB: Itu enggak boleh dilakukan, karena pemerintah sudah intervensi dengan harga-harga tertentu. Tapi memang mungkin ada justifikasi untuk hal-hal tertentu. Misalnya gini: perusahaan itu enggak bisa juga compete sampai harganya nol, kemudian faktor keamanan ditiadakan. Kan ada biaya minimum yang harus dilakukan. Tadi saya bicara listrik. Ada juga bagian dari listrik yang enggak mungkin, kalau toh dibuka pasarnya, swasta enggak mungkin masuk karena biayanya terlalu mahal. Misalnya, transmisi. Itu bikin kabel ke rumah, swasta susah sekali masuk. Atau saya ambil contoh di Amerika. Kalau NASA dilakukan privatisasi, liberalisasi untuk NASA, itu enggak ada private sector yang mau masuk, yang bikin Appolo. Jadi ada posisi di mana kondisinya adalah natural, dimana government akan berperan. Dan itu ada sektor-sektor tertentu, misalnya saya tadi kasih contoh transmisi. Itu susah sekali, karena swasta enggak mau masuk kalau dia sampai rugi, dia enggak mungkin menjual transmisi. Tapi yang bisa dilakukan privatisasi dalam listrik adalah pembangkitnya. Karena pembangkit, kalau Anda rugi, Anda bisa jual. Jalan tol itu misalnya, Anda enggak bisa re-sale, Anda enggak bisa jual. Karena itu ada sektor-sektor tertentu yang karakteristiknya menjadi khusus, dimana government punya rule. Maka disebut jalan tol sebagai club of good. Polanya mirip seperti pemerintah, tapi kepemilikannya dikasih swasta dan dalam periode-periode tertentu nanti bisa dikembalikan. Jadi ini sebetulnya adalah kelanjutan dari pembicaraan privatisasi secara lebih detil. Jadi sektornya apa, itu karakteristiknya akan sangat berbeda. Tentunya enggak bisa semuanya, saya ambil contoh misalnya NASA. Amerika boleh buka itu, tapi saya yakin enggak ada swasta yang mau beli. Entah Donald Trump atau Rockefeller.

HB: De, yang mau Anda katakan kira-kira jangan khawatirlah (dengan privatisasi). Selalu ada sektor-sektor tertentu di mana peran pemerintah akan tetap dominan?

MCB: Pasti.

HB: Untuk itu enggak ada persoalan?

MCB: Enggak ada persoalan.

HB: Dan itu enggak berlawanan dengan semangat liberal?

MCB: Enggak ada. Karena memang pada akhirnya esensinya begini: basis dari pemikiran liberal adalah Voluntarily. Kalau Anda melakukan sesuatu, Anda enggak terpaksa karena ada insentif. Segala sesuatu itu dasarnya karena memang Anda melihat dan ada keinginan untuk melakukan itu. Karena kita percaya bahwa tiap orang punya kependain sendiri-sendiri. Negara itu kan sebetulnya suka mengatur. Ini kan sebetulnya berangkat dari filsafat Tuhan: 'Saya lebih tahu dari kamu'. Itu kan cara berpikir filsafat Tuhan. Karena itu sebetulnya kalau kita percaya bahwa petani itu cukup pintar, semua orang cukup pintar, dia akan bikin decision untuk dirinya sendiri. Kalau itu, ya biarin aja.

HB: De, dalam Islam kalau percaya pada selain Tuhan itu syirik. Syirik itu dosanya enggak bisa diampuni. Jadi kalau orang terus mengandalkan kepada negara, dengan demikian mengasumsikan negara seperti Tuhan maka syiriklah dia. Terakhir, Anda yakin betul bahwa ekonomi liberal memakmurkan orang banyak lebih cepat dan lebih luas?

MCB: Saya bisa salah, tapi bukti empirisnya menunjukkan begitu. Salah satu kekautan dari mekanisme pasar adalah dia memungkinkan dirinya dikritik untuk sebuah kesalahan, sedangkan command market itu selalu menganggap dirinya final, sempurna. Karena itu dia enggak perlu melakukan adjustment. Nah pasar, karena selalu prosesnya adalah proses yang memungkinkan terjadinya perubahan permintaan dan penawaran, dia memungkinkan dirinya untuk di kritik, untuk selalu berubah karena dia bukan sesuatu yang final. Karena mereka percaya bahwa perubahan bisa terjadi, saya kira itu hanya bisa diadopt di dalam sistem pasar.

HB: Baik, waktunya habis. Terima kasih sekali. Demikian tadi perbincangan privatisasi dengan DR. Chatib Basri dari LPEM UI. Sekali lagi, saya mengingatkan untuk anda yang ingin menanggapi wawancara ini, silahkan kirim sms ke 021-70 497 497. Saya Hamid Basyaib, Wassalam!

Tanggapan:

1. 081310709098: Pertanyaan saya, sudah siapkah masyarakat Indonesia ini dengan dampak privatisasi? Jangan-jangan yang kaya akan semakin kaya dan miskin akan terpuruk. Karena situasi yang mendukungnya menurut saya belum siap. Karenanya yang korban pasti rakyat kecil. Thx
2. 08121994959: Anda benar-benar kapitalis sejati. Congrulation!

3. 021 70798616: saya setuju peran negara diminimalkan, tapi apa bisa pihak swasta itu mendukung rakyat kecil yang tidak menguntungkan mereka?